

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

**KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PURI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Renja Kecamatan Puri dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang mengalami perkembangan setelah dokumen Ranwal Renja disusun. Proses perubahan ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Puri pada Tahun 2025 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga penyusunan akhir. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025
Kecamatan Puri



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP.M.Med.Kom

Pembina Tk.I

NIP. 19810402 199912 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... i

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 20258

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah8

2.2 Review terhadap Perubahan RKPD.....27

2.3 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 202538

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun
202535

3.2 Tagging Tematik.....42

BAB IV PENUTUP49

4.1 Catatan Penting.....47

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan48

4.3 Rencana Tindak Lanjut.....48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: “***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur***”.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam empat misi pembangunan daerah, di mana Misi Ketiga yaitu “**Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat** “. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah “**Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan** “.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja

Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Puri Nomor : 188/76/416-311/2024 tentang Tim Penyusunan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

3.2. *Tagging* Tematik

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN III TAHUN 2025

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Puri sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan serta 20 sub kegiatan dengan anggaran Rp 2.951.547.000 dari hasil realisasi keuangan sebesar Rp 1.267.364.212,00 atau 42,94% sedangkan realisasi kinerja 37,01 % (kategori rendah). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten

Kecamatan Puri

2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	
								I		II		III		IV		I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal		Nilai IKM(Nilai)					93,77																					
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan(%)		250.000.000,00		136.427.000,00	100,00	19.000.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	14.770.000,00	0,00	3.992.100,00	0,00	0,00	0	0	25,00	18.762.100,00		155.189.100,00
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan(pelayanan)		250.000.000,00		136.427.000,00	2.500,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1477000	1.431,00	3992100	0,00	0	0,00	0	1.431,00	18.762.100,00		155.189.100,00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan(Dokumen)					15,00	19.000.000,00	3,00		3,00		4,00		5,00		3,00	14.770.000,00	4,00	3.992.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	18.762.100,00		

		Perizinan Non Usaha																											
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Koordinasi yang di tindaklanjuti(%)		1.900.000 .000,00		980.168. 550,00	100, 00	176.600. 000,00	25 ,0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0,00	0, 0 0	25 ,0 0	28.892. 400,00	0,00	12.384. 700,00	0, 0 0	0, 0 0	0	0	25,0 0	41.277. 100,00		1.021.445 .650,00
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Dokumen)		1.900.000 .000,00		980.168. 550,00	18,0 0	176.600. 000,00	0, 00	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	18,0 0	0, 0 0	0, 00	288924 00	7,00	123847 00	0, 0 0	0	0, 0 0	0	7,00	41.277. 100,00		1.021.445 .650,00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01. 0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					6,00	37.600.0 00,00	2, 00		0, 0 0		3, 0 0		1,00		2, 00	15.825. 000,00	0,00	3.280.0 00,00	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	2,00	19.105. 000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01. 0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)					3,00	17.000.0 00,00	2, 00		0, 0 0		0, 0 0		1,00		2, 00	12.168. 300,00	0,00	0,00	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	2,00	12.168. 300,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01. 0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban					3,00	35.000.0 00,00	0, 00		0, 0 0		1, 0 0		2,00		0, 00	0,00	0,00	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0,00				

[illegible]

3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		15.750.00 2.685,00		7.747.95 3.447,00	12,0 0	2.491.44 7.000,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	12,0 0	0, 00	0, 00	534254 334	6,00	321902 185	0, 00	0	0, 00	0	6,00	856.156 .519,00		8.604.109 .966,00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bul an)					17,0 0	2.491.44 7.000,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	17,0 0		17 .0 0	534.254 .334,00	0,00	321.902 .185,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	17,0 0	856.156 .519,00			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		940.700.0 00,00		572.268. 200,00	90,0 0	99.860.0 00,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	181500 0	0,00	220220 00	0, 00	0	0, 00	0	0,00	23.837. 000,00		596.105.2 00,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan(Pak et)					1,00	3.000.00 0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1,00		0, 00	1.000.0 00,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	1.000.0 00,00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Pak et)					1,00	21.160.0 00,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1,00		0, 00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Pak et)					4,00	45.000.0 00,00	1, 00	1, 00	1, 00	1, 00	1,00		0, 00	0,00	1,00	18.210. 000,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1,00	18.210. 000,00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Pak et)					2,00	3.500.00 0,00	0, 00	1, 00	0, 00	0, 00	1,00		0, 00	215.000 ,00	1,00	1.412.0 00,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1,00	1.627.0 00,00			

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					1,00	2.700.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	800.000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4,00	24.200.000,00	1,00		1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	1,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.200.000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					1,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		390.000.000,00	348.926.976,00		100,00	123.530.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	25925228	0,00	20726464	0,00	0	0,00	0	0,00	46.651.692,00	395.578.668,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					24,00	51.530.000,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	14.570.988,00	6,00	9.372.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	23.943.212,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan(laporan)					12,00	72.000.000,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	11.354.240,00	3,00	11.354.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	22.708.480,00		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)		353.500.000,00	409.848.117,00		90,00	37.910.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	8160000	0,00	6460000	0,00	0	0,00	0	0,00	14.620.000,00	424.468.117,00	

[illegible]

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				7,00	1.600.000,00	2,00		2,00		2,00		1,00		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				11,00	1.600.000,00	4,00		3,00		2,00		2,00		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		15.750.002.685,00	7.747.953.447,00	12,00	2.491.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	534254334	6,00	321902185	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	856.156.519,00		8.604.109.966,00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				17,00	2.491.447.000,00	0,00		0,00		0,00		17,00		534.254.334,00	0,00	321.902.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	856.156.519,00		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		940.700.000,00	572.268.200,00	90,00	99.860.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1815000	0,00	22022000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.837.000,00		596.105.200,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	21.160.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				4,00	45.000.000,00	1,00		1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	1,00	18.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18.210.000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				2,00	3.500.000,00	0,00		1,00		0,00		1,00		0,00	215.000,00	1,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.627.000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)				1,00	2.700.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	800.000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				4,00	24.200.000,00	1,00		1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	1,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.200.000,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				1,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		390.000.000,00	348.926.976,00	100,00	123.530.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25925228	0,00	20726464	0,00	0	0,00	0	0,00	46.651.692,00		395.578.668,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24,00	51.530.000,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	14.570.988,00	6,00	9.372.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	23.943.212,00		

		Sumber Daya Air dan Listrik	yang Disediakan(Lap oran)																									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan(laporan)				12,00	72.000.000,00	3,00		3,000	3,000		3,00		3,00	11.354.240,00	3,00	11.354.240,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,00	22.708.480,00			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)		353.500.000,00	409.848.117,00	90,00	37.910.000,00		0,000	0,000	0,000		0,000	0,00	8160000	0,00	6460000	0,000	0	0,000	0	0,00	14.620.000,00		424.468.117,00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				1,00	31.250.000,00	0,00		0,000	0,000		1,00		0,00	6.300.000,00	0,00	4.800.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	11.100.000,00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3,00	3.000.000,00	0,00		0,000	0,000		3,00		0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1.660.000,00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				10,00	3.660.000,00	0,00		0,000	0,000		10,00		0,00	1.860.000,00	5,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,00	1.860.000,00			

[illegible]

[illegible]

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan dengan target kinerja 100% . Pada Triwulan II Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwan Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah.

Didalam program tersebut ada 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan .

- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Capaian Kinerja pada Triwulan II adalah Tinggi, dengan Target Kinerja 2.500 Pelayanan terelasisasi 1.914 Pelayanan.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan, Capaian Kinerja pada Triwulan II adalah Sangat Tinggi , dengan target Kinerja pada Triwulan II adalah 6 laporan dan terealisasi 6 laporan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 %. Pada Triwulan II Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwan Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah.

Pada program tersebut terdapat 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , Capaian Kinerja pada Triwulan 1 adalah Tinggi , dengan target Kinerja 7 Fasilitasi dan terealisasi 7 Fasilitasi.

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa , Capaian Kinerja pada Triwulan III adalah Sangat Tinggi , hal ini dikarenakan dari target 2 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu Evaluasi Raperdes Pertanggungjawaban APBDES dan Penilaian Monitoring dan Evaluasi Lomba Desa.

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Capaian Kinerja pada Triwulan II adalah Sangat Tinggi, hal ini dikarenakan dari target 2 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu kegiatan Musrenbang Tematik dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Capaian Kinerja Kinerja pada Triwulan II adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan Belum adanya pelaksanaan kegiatan.

d. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, Capaian Kinerja pada Triwulan III adalah Sangat Tinggi hal ini dikarenakan dari target 3 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu Sapi Qurban, kegiatan Doa Bersama Toga dan Pemberdayaan LKD.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat daerah dengan target 85 (A) , Capaian Kinerja pada Triwulan II masih belum dapat diukur hal ini dikarenakan Penilaian SAKIP masih belum dilaksanakan.

Pada program tersebut ada 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Indikator Kinerja adalah Persentase Indikator program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target , Capaian Kinerja pada Triwulan II ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perangkat Daerah , Pada Triwulan II tercapai dengan predikat sangat Tinggi , semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 4 Dokumen tersusunnya Rancangan Awal Renja 2026 dan Rancangan Renja 2026, Rankir Renja 2026 dan Rankir Perubahan Renja 2025.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Pada Triwulan II tercapai dengan predikat sangat Tinggi , semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 4 Dokumen tersusunnya, 1 Laporan LKjIP, 1 Laporan Keuangan, 1 Laporan LKPJ, 1 Perjanjian Kinerja.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 96% pada Triwulan II ini masih tercapai 42,94 % dengan predikat Penilaian Sedang hal ini dikarenakan Realisasi pelaksanaan kegiatan masih belum banyak terlaksana.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN , pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan semua ASN Kecamatan Puri telah menerima gaji sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan . Capaian Kinerja pada Triwulan II ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan , pada Triwulan II ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih dilaksanakan 1 kali kegiatan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket), pada Triwulan II ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Rendah dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan terlaksana 1 paket dari rencana kegiatan yaitu 2 Paket.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, pada Triwulan II ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 1 paket.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 1 Dokumen.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya rendah dikarenakan pelaksanaan Capaian Kinerja nya Rendah dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan terlaksana 1 paket dari rencana kegiatan yaitu 2 Paket.
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada Triwulan II ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan Capaian Kinerja pada Triwulan II ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 12 Laporan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan , pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 6Laporan.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik , pada Triwulan II ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Indikator Kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, pada Triwulan II ini capaian Kinerja Tinggi hal ini dikarenakan sudah terlaksananya sub kegiatan ini sebanyak 2 kali.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Triwulan II ini capaian Kinerja sangat tinggi hal ini dikarenakan sudah terlaksananya sub kegiatan ini sesuai target yaitu 1 kali.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, pada Triwulan II ini capaian Kinerja sangat tinggi hal ini dikarenakan sudah terlaksananya sub kegiatan ini sesuai target yaitu 5 unit.
- 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
 - b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Program/kegiatan menjadi tidak cost-effective, berdampak pada evaluasi keuangan tahunan;
 - e. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
 - f. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :
- a. melaksanakan monitoring secara rutin pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Puri;
 - b. melakukan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program kedepannya;
 - c. memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi;

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (TC-29) Kabupaten Mojokerto

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86
Tahun 2017) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5	84,23	85	84,95	99,9%	85		
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	100%	7 Inovasi		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Indikator Program Perangkat	NA	100%	100%	100%	100%	NA		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah yang Tercapai Sesuai Target								
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	100%	NA	NA	NA	NA	100%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	7 dokumen		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD	96%	93,32%	93,35%	95,75	102%	96%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	18 orang/bulan	19 orang/bulan	18 orang/bulan	18 orang/bulan	100%	17 orang/bulan		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	95%	100%	100%	100%	100%	95%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 paket	5 paket	5 paket	100%	1 paket		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket		

7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%	100%	100%	100%	100%	95%		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit		

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	NA	6.115 pelayanan	1.100 pelayanan	7.147 pelayanan	100%	NA		
		Persentase Aduan Masyarakat yang telah Ditindaklanjuti	100%	NA	NA	NA	NA	100%		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 aporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA	23 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	100%	NA		
		Jumlah laporan koordinasi	26 laporan	NA	NA	NA	NA	26 laporan		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	8 dokumen	NA	NA	NA	NA	8 dokumen		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen		

		Ketertiban Umum(Dokumen)								
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	12 dokumen		

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjang melalui 5 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara umum telah terlaksana sesuai target.
Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.755.947.000,00, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.200.622.912,00 atau sebesar 43,56%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditunjang melalui 1 Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat secara umum belum terlaksana sesuai target. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih belum terlaksana di Sub Kegiatan. Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 19.000.000,00, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 18.762.100,00 atau sebesar 98,75%.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditunjang melalui 1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara umum belum terlaksana sesuai target. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih belum terlaksana di beberapa di Sub Kegiatan.
Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 176.600.000,00, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 45.479.200,00 atau sebesar 25,75%.

2.2. Review Terhadap Perubahan RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2025) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.” Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.”

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kecamatan adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ;. Sesuai dengan Pagu anggaran indikatif dalam Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp. 3.310.047.000,00 yang bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

NO	APBD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (PERUBAHAN APBD 2025)					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN PURI				2.941.447.000	KECAMATAN PURI				3.310.047.000	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Puri	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	2.741.447.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Puri	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	2.805.957.500	
		Kecamatan Puri	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi			Kecamatan Puri	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00%	3.200.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	1.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	1.600.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96%	2.491.447.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96%	2.491.447.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kecamatan Puri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	2.491.447.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kecamatan Puri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	2.491.447.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	81	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	81	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Puri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Puri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	83.560.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	116.860.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.160.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	38.160.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.700.000	

	Penyediaan Bahan / Material	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	24.200.000	Penyediaan Bahan / Material	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	24.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Puri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Sekcam, 2 KasubBag, 5 Kasi)	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Puri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Sekcam, 2 KasubBag, 5 Kasi)	-	-	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Pengadaan Mebel	Kecamatan Puri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	123.530.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	131.540.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	51.530.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	59.540.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	90%	37.910.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puri	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	90%	62.910.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	31.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	31.250.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	3.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	28.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Puri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	3.660.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Puri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	3.660.000	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Puri	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100,00%	19.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Puri	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100,00%	19.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puri	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	19.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puri	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	19.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha	15 Laporan	19.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Puri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha	15 Laporan	19.000.000	
III	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puri	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%	181.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puri	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%	485.089.500	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puri	Jumlah laporan koordinasi	18 Dokumen	181.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puri	Jumlah laporan koordinasi	20 Dokumen	485.089.500	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	37.600.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	17.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	17.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	37.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	336.489.500	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	87.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	94.000.000	
JUMLAH TOTAL					2.941.447.000					3.310.047.000	

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Puri melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Puri secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.5 (T-C. 3.2)
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

OPD: Kecamatan Puri

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Puri sampai dengan Tribulan I yang masih rendah, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Puri untuk Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, serta penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Pada Perubahan rencana Kerja 2025 ada beberapa penambahan dan pengurangan anggaran di beberapa Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semula Rp 21.160.000,00 di Perubahan Rencana Kerja 2025 ada penambahan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 sehingga menjadi Rp 38.160.000,00
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula Rp. 51.530.000, 00 menjadi Rp. 59.540.500,00 ada penambahan sebesar Rp. 8.010.000,00.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ada penambahan sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk perbaikan plafon kantor yang rusak.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada penambahan anggaran sebesar Rp. 301.489.500,00 dimana akan dipergunakan untuk Anggaran Wawasan Kebangsaan dan juga

penambahan Honorarium Tim Forkopimca Kecamatan Puri dan juga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ada tambahan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00 dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk Kegiatan Pleno PKK dan Pemulasaraan Jenazah.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Puri Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan P-Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEG IATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TAMBAH / KURANG	SUMB ER DANA
				APBD	APBD EFISIENSI	P-APBD	APBD	APBD EFISIENSI	P-APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	KECAMATAN PURI						2.941.447.000	2.951.547.000	3.310.047.000	358.500.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Puri	85 (A)	85 (A)	85 (A)	2.741.447.000	2.755.947.000	2.805.957.500	50.010.500	APBD
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kec. Puri	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	-	-	-	-	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kec. Puri	100,00%	100,00%	100,00%	5.000.000	3.200.000	3.200.000	-	APBD
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	2.500.000	1.600.000	1.600.000	-	APBD

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	2.500.000	1.600.000	1.600.000		APBD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kec. Puri	96%	96%	96%	2.491.447.000	2.491.447.000	2.491.447.000		APBD
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	2.491.447.000	2.491.447.000	2.491.447.000	-	APBD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Puri	100%	100%	100%	83.560.000	99.860.000	116.860.000	17.000.000	APBD
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	1 paket	1 paket	1 paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	APBD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	1 paket	1 paket	1 paket	21.160.000	21.160.000	38.160.000	17.000.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	4 Paket	4 Paket	14 Paket	20.000.000	45.000.000	45.000.000	-	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Puri	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	APBD

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Puri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	APBD
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kec. Puri	4 Paket	4 Paket	4 Paket	24.200.000	24.200.000	24.200.000	-	APBD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	300.000	300.000	-	APBD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Puri	100,00%	100,00%	100,00%	123.530.000	123.530.000	131.540.500	8.010.500	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Puri	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	51.530.000	51.530.000	59.540.500	8.010.500	APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	72.000.000	72.000.000	-	APBD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kec. Puri	100%	100%	100%	37.910.000	37.910.000	62.910.000	25.000.000	APBD

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Puri	1 unit	1 unit	1 unit	31.250.000	31.250.000	31.250.000	-	APBD
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Puri	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.000.000	3.000.000	28.000.000	25.000.000	APBD
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Puri	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3.660.000	3.660.000	3.660.000	-	APBD
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Kec. Puri	100%	100%	100%	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	APBD
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Kec. Puri	100%	100%	100%	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	APBD
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Puri	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	APBD
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Puri	100,00%	100,00%	100,00%	181.000.000	176.600.000	485.089.500	308.489.500	APBD

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	Kec. Puri	18 Fasilitasi	18 Fasilitasi	20 Fasilitasi	181.000.000	176.600.000	485.089.500	308.489.500	APBD
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	37.600.000	37.600.000	-	APBD
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	APBD
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000	35.000.000	336.489.500	301.489.500	APBD
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	87.000.000	87.000.000	94.000.000	7.000.000	APBD

3.2. Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun daftar tagging subkegiatan dilingkup Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tagging Subkegiatan yang Mendukung Program/Kegiatan Tematik
Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025										
			KABUPATE N LAYAK ANAK	KABUPATE N SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN PURI				19.000.000					3.310.047.000			3.310.047.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								2.805.957.500			2.805.957.500
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai								3.200.000			3.200.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								1.600.000			1.600.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.600.000			1.600.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah								2.491.447.000			2.491.447.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								2.491.447.000			2.491.447.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan								116.860.000			116.860.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								3.000.000			3.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan								38.160.000			38.160.000

		Kantor yang Disediakan											
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								45.000.000			45.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								3.500.000			3.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								2.700.000			2.700.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan								24.200.000			24.200.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								300.000			300.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan								131.540.500			131.540.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								59.540.500			59.540.500
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								72.000.000			72.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik								62.910.000			62.910.000

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								31.250.000			31.250.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								28.000.000			28.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								3.660.000			3.660.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan			19.000.000					19.000.000			19.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan			19.000.000					19.000.000			19.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			19.000.000					19.000.000			19.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti								485.089.500			485.089.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								485.089.500			485.089.500
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								37.600.000			37.600.000

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								17.000.000			17.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								336.489.500			336.489.500
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								94.000.000			94.000.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puri Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Puri dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Puri.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025

- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran.

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Juni 2025
Kecamatan Puri



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP.M.Med.Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19810402 199912 2 001